



BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ENREKANG
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka

Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Kepada Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Tahun 2021 Nomor 246, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4547);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3622);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2021 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Enrekang Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2022 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENREKANG

dan

BUPATI ENREKANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah berupa laporan keuangan memuat :

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan-saldo anggaran lebih;
- c. neraca;
- d. laporan operasional;
- e. laporan arus kas;
- f. laporan perubahan ekuitas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, sebagai berikut :

a. pendapatan	Rp. 982.631.564.275,98
b. belanja	<u>Rp. 1.262.300.840.319,64</u>
surplus/(defisit)	Rp. (279.669.276.043,66)
c. pembiayaan	
1. penerimaan	Rp. 349.527.067.579,66
2. pengeluaran	<u>Rp. 4.365.002.130,00</u>
Jumlah Pembiayaan netto	Rp. 345.162.065.449,66

Pasal 3

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 82.925.503.160,02 dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran pendapatan	Rp.1.065.557.067.436,00
setelah perubahan	
b. realisasi	<u>Rp. 982.631.564.275,98</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp. 82.925.503.160,02

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja daerah sejumlah
Rp. 152.732.379.180,36
- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| a. anggaran belanja setelah perubahan | Rp.1.415.033.219.500,00 |
| b. realisasi | <u>Rp.1.262.300.840.319,64</u> |
| selisih lebih/(kurang) | Rp. 152.732.379.180,36 |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
Rp. (69.806.876.010,34) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| a. surplus/defisit setelah perubahan | Rp. (349.476.152.054,00) |
| b. realisasi | <u>Rp. (279.669.276.043,66)</u> |
| selisih lebih/(kurang) | Rp. (69.806.876.010,34) |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
sejumlah Rp.5.099.786.999,34 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|-------------------------------|
| a. anggaran penerimaan pembangunan setelah perubahan | Rp. 354.626.854.579,00 |
| b. realisasi | <u>Rp. 349.527.067.579,66</u> |
| selisih lebih/(kurang) | Rp. 5.099.786.999,34 |
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
sejumlah Rp. 785.700.385,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---|-----------------------------|
| a. anggaran pengeluaran pembangunan setelah perubahan | Rp. 5.150.702.515,00 |
| b. realisasi | <u>Rp. 4.365.002.130,00</u> |
| selisih lebih/(kurang) | Rp. 785.700.385,00 |
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah
Rp. 4.314.086.614,34 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---|-------------------------------|
| a. anggaran pembangunan netto setelah perubahan | Rp. 349.476.152.064,00 |
| b. realisasi | <u>Rp. 345.162.065.449,66</u> |
| selisih lebih/(kurang) | Rp. 4.314.086.614,34 |

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih (LP-SAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| a. saldo anggaran lebih awal | Rp. 23.401.854.579,66 |
|------------------------------|-----------------------|

b. penggunaan sisa anggaran lebih sebagai penerimaan lebih pembayaran tahun berjalan	Rp. 23.401.854.579,66
c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp. 65.492.789.406,00
d. lain-lain (koreksi kesalahan pembukaan tahun sebelumnya)	Rp. 0,00
e. saldo anggaran lebih akhir	Rp. 65.492.789.406,00

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, sebagai berikut :

a. jumlah asset	Rp. 2.477.885.002.622,68
b. jumlah kewajiban	Rp. 125.846.525.274,69
c. jumlah ekuitas dan kewajiban	Rp. 2.477.885.002.622,66

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d, sebagai berikut :

a. pendapatan	Rp. 948.958.224.010,38
b. beban	Rp. 917.624.063.684,87
c. surplus/(Defisit)	Rp. 31.334.160.325,51
d. surplus non operasional	Rp. 1.036.683.175,00
e. surplus/defisit dari Kegiatan non operasional	Rp. (5.014.675.856,11)
f. surplus/defisit sebelum pos luar biasa	Rp. 26.319.484.469,40
g. surplus/defisit - LO	Rp. 25.102.875.125,76

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut :

a. saldo kas awal per 1 Januari 2022	Rp. 23.403.393.349,66
b. arus kas dari aktifitas operasi	Rp. 127.913.190.237,34

c. arus kas dari aktifitas investasi	Rp. (407.582.466.281,00)
d. arus Kas dari aktifitas pendanaan	Rp. 321.760.210.870,00
e. arus kas dari aktifitas non anggaran	Rp. 1.832.212,00
f. saldo awal kas di BUD+ kas bendahara pengeluaran	Rp. 22.478.938.589,02
g. saldo akhir kas bendahara pengeluaran	Rp. 625.498,00
h. saldo akhir kas di bendahara penerimaan	Rp. 26.901.526,80
i. saldo akhir kas di Bendahara dana kapitasi JKN	Rp. 77.844.294,00
j. saldo akhir kas di Bendahara BOS	Rp. 9.016.084,00
k. saldo akhir kas per per 31 Desember 2022	Rp. 65.494.621.618,00

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f, sebagai berikut :

a. ekuitas Awal	Rp. 1.988.411.574.533,34
b. surplus/defisit - LO	Rp. 25.102.875.125,76
c. ekuitas akhir	Rp. 1.977.895.427.659,97

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas:
 1. lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

2. lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 3. lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 4. lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan;
- b. lampiran II : Laporan Perubahan SAL;
 - c. lampiran III : Laporan operasional;
 - d. lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
 - e. lampiran V : Neraca;
 - f. lampiran VI : Laporan arus kas
 - g. lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
 - h. lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
 - i. lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
 - j. lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
 - k. lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
 - l. lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - m. lampiran XII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
 - n. lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
 - o. lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya
 - p. lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
 - q. lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
 - r. lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
 - s. lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2022 dan

dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

- t. lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri:
- lampiran XXI : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- lampiran XXII : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal 24 Agustus 2023
BUPATI ENREKANG,



Diundangkan di Enrekang
pada tanggal 24 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

BABA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2023
NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.02.049.23



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
BULAN DESEMBER TAHUN 2022

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	%	SISA PAGU	REALISASI 2021
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	176,262,839,970.00	102,309,392,990.98	58.04	73,953,446,979.02	73,308,654,593.08
4.1.01	Pajak Daerah	14,752,533,553.00	16,231,913,936.18	110.03	-1,479,380,383.18	13,400,072,275.19
4.1.01.06	Pajak Hotel	20,000,000.00	17,375,500.00	86.88	2,624,500.00	17,791,000.00
4.1.01.07	Pajak Restoran	1,200,000,000.00	1,231,405,946.43	102.62	-31,405,946.43	1,180,333,714.19
4.1.01.08	Pajak Hiburan	15,000,000.00	9,182,750.00	61.22	5,817,250.00	0.00
4.1.01.09	Pajak Reklame	453,533,553.00	374,418,144.00	82.56	79,115,409.00	426,554,890.00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	5,500,000,000.00	6,230,078,875.00	113.27	-730,078,875.00	5,398,827,405.00
4.1.01.11	Pajak Parkir	24,000,000.00	5,250,000.00	21.88	18,750,000.00	4,050,000.00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	10,000,000.00	1,600,000.00	16.00	8,400,000.00	3,300,000.00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2,000,000,000.00	2,554,890,604.00	127.74	-554,890,604.00	1,242,692,303.00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	4,230,000,000.00	4,584,632,048.00	108.38	-354,632,048.00	3,647,405,563.00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1,300,000,000.00	1,223,080,068.75	94.08	76,919,931.25	1,479,117,400.00
4.1.02	Retribusi Daerah	58,897,523,071.00	51,972,683,462.00	88.24	6,924,839,609.00	27,018,859,184.00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	56,851,823,071.00	50,318,589,867.00	88.51	6,533,233,204.00	25,445,935,708.00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1,708,550,000.00	1,472,643,900.00	86.19	235,906,100.00	1,429,300,250.00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	337,150,000.00	181,449,695.00	53.82	155,700,305.00	143,623,226.00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18,741,119,760.00	13,466,084,356.00	71.85	5,275,035,404.00	15,896,115,974.00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	18,741,119,760.00	13,466,084,356.00	71.85	5,275,035,404.00	15,896,115,974.00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	83,871,663,586.00	20,638,711,236.80	24.61	63,232,952,349.20	16,993,607,159.89
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	63,594,929,671.00	1,036,683,175.00	1.63	62,558,246,496.00	122,847,000.00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	90,000,000.00	88,000,000.00	97.78	2,000,000.00	57,380,000.00
4.1.04.05	Jasa Giro	859,548,577.00	2,300,644,944.42	267.66	-1,441,096,367.42	887,467,888.00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	1,245,623,294.00	1,504,589,031.00	120.79	-258,965,737.00	26,301,369.00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	700,000,000.00	1,838,455,494.10	262.64	-1,138,455,494.10	2,686,335,925.06
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	3,955,187,310.00	1,124,456,774.28	28.43	2,830,730,535.72	101,334,865.10
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	90,000,000.00	0.00	0.00	90,000,000.00	0.00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	425,000,000.00	606,732,234.00	142.76	-181,732,234.00	1,869,330,706.73
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	12,911,374,734.00	12,139,149,584.00	94.02	772,225,150.00	11,242,609,406.00
4.1.04.19	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0.00	0.00		0.00	0.00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	887,294,227,466.00	880,321,968,985.00	99.21	6,972,258,481.00	916,110,206,456.00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	838,225,651,000.00	823,676,440,803.00	98.26	14,549,210,197.00	877,880,671,777.00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	733,662,752,000.00	719,209,402,403.00	98.03	14,453,349,597.00	754,122,446,777.00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	5,722,448,000.00	5,722,448,000.00	100.00	0.00	8,367,416,000.00
4.2.01.05	Dana Desa	98,840,451,000.00	98,744,590,400.00	99.90	95,860,600.00	115,390,809,000.00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	49,068,576,466.00	56,645,528,182.00	115.44	-7,576,951,716.00	38,229,534,679.00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	38,066,579,666.00	46,212,548,682.00	121.40	-8,145,969,016.00	35,988,165,679.00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	11,001,996,800.00	10,432,979,500.00	94.83	569,017,300.00	2,241,369,000.00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2,000,000,000.00	202,300.00	0.01	1,999,797,700.00	33,404,613,000.00
4.3.01	Pendapatan Hibah	2,000,000,000.00	202,300.00	0.01	1,999,797,700.00	3,213,000,000.00
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	2,000,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000,000.00	3,213,000,000.00
4.3.01.05	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0.00	202,300.00		-202,300.00	0.00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0.00	0.00		0.00	30,191,613,000.00
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	0.00	0.00		0.00	30,191,613,000.00
	JUMLAH PENDAPATAN	1,065,557,067,436.00	982,631,564,275.98	92.22	82,925,503,160.02	1,022,823,474,049.08
5.1	BELANJA OPERASI	762,442,758,072.00	702,493,465,660.00	92.14	59,949,292,412.00	690,392,852,608.10
5.1.01	Belanja Pegawai	428,467,107,079.00	396,583,519,446.00	92.56	31,883,587,633.00	403,037,853,822.00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	306,746,429,384.00	297,314,014,102.00	96.93	9,432,415,282.00	292,163,998,228.00



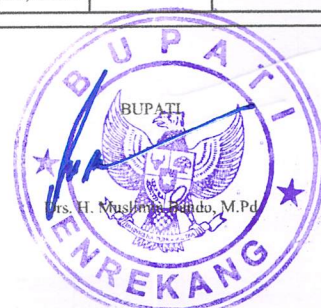
PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
BULAN DESEMBER TAHUN 2022

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	%	SISA PAGU	REALISASI 2021
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	8,671,303,381.00	4,603,122,918.00	53.08	4,068,180,463.00	4,949,574,260.00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	97,970,349,353.00	83,933,326,114.00	85.67	14,037,023,239.00	96,581,430,377.00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	9,968,928,457.00	9,872,172,570.00	99.03	96,755,887.00	8,824,333,197.00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	164,140,130.00	150,003,742.00	91.39	14,136,388.00	7,637,760.00
5.1.01.06	Belanja Pencrimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	710,880,000.00	710,880,000.00	100.00	0.00	510,880,000.00
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	4,235,076,374.00	0.00	0.00	4,235,076,374.00	0.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	297,634,038,685.00	273,232,365,162.00	91.80	24,401,673,523.00	261,796,418,544.10
5.1.02.01	Belanja Barang	53,436,900,279.00	50,007,656,148.00	93.58	3,429,244,131.00	38,928,966,814.10
5.1.02.02	Belanja Jasa	154,077,744,026.00	136,777,915,446.00	88.77	17,299,828,580.00	134,871,735,218.00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	7,873,110,396.00	5,519,442,359.00	70.10	2,353,668,037.00	5,847,853,590.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	58,195,386,725.00	54,796,504,436.00	94.16	3,398,882,289.00	51,187,330,284.00
5.1.02.05	Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2,205,250,000.00	2,034,154,509.00	92.24	171,095,491.00	5,685,940,820.00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	21,845,647,259.00	24,096,692,264.00	110.30	-2,251,045,005.00	25,274,591,818.00
5.1.03	Belanja Bunga	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020,968,750.00
5.1.03.01	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020,968,750.00
5.1.05	Belanja Hibah	35,941,612,308.00	32,277,581,052.00	89.81	3,664,031,256.00	23,342,811,492.00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	33,304,410,867.00	29,683,561,867.00	89.13	3,620,849,000.00	22,570,155,307.00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	1,864,545,256.00	1,821,363,000.00	97.68	43,182,256.00	0.00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	772,656,185.00	772,656,185.00	100.00	0.00	772,656,185.00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	400,000,000.00	400,000,000.00	100.00	0.00	1,194,800,000.00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500,000.00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	300,000,000.00	300,000,000.00	100.00	0.00	542,500,000.00
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00	0.00	632,800,000.00
5.2	BELANJA MODAL	495,333,676,585.00	408,619,149,456.00	82.49	86,714,527,129.00	252,239,969,483.00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1,025,000,000.00	0.00	0.00	1,025,000,000.00	1,159,712,000.00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	1,025,000,000.00	0.00	0.00	1,025,000,000.00	1,159,712,000.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57,468,041,083.00	56,682,720,476.00	98.63	785,320,607.00	31,835,297,573.00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	853,070,400.00	853,070,400.00	100.00	0.00	1,990,497,600.00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	2,752,921,010.00	2,718,160,700.00	98.74	34,760,310.00	3,763,782,400.00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	19,245,000.00	19,025,000.00	98.86	220,000.00	0.00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4,258,683,283.00	3,907,712,568.00	91.76	350,970,715.00	2,951,299,585.00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	677,854,395.00	667,144,770.00	98.42	10,709,625.00	0.00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	21,454,453,635.00	20,881,835,939.00	97.33	572,617,696.00	10,460,909,096.00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	21,526,004,000.00	21,523,480,000.00	99.99	2,524,000.00	43,230,000.00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	2,556,803,234.00	2,280,742,650.00	89.20	276,060,584.00	1,673,216,950.00
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	8,912,500.00	8,900,000.00	99.86	12,500.00	0.00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	583,514,635.00	583,514,635.00	100.00	0.00	0.00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	14,950,000.00	14,913,000.00	99.75	37,000.00	119,944,000.00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2,761,628,991.00	3,224,220,814.00	116.75	-462,591,823.00	10,829,417,942.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	135,996,924,932.00	126,187,497,325.00	92.79	9,809,427,607.00	83,740,876,388.00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	135,966,924,932.00	126,187,497,325.00	92.81	9,779,427,607.00	83,740,876,388.00
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	299,712,978,450.00	224,365,034,450.00	74.86	75,347,944,000.00	134,749,969,902.00



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
BULAN DESEMBER TAHUN 2022

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	%	SISA PAGU	REALISASI 2021
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	290,974,539,750.00	216,445,717,250.00	74.39	74,528,822,500.00	118,727,377,162.00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	6,369,966,700.00	5,587,379,200.00	87.71	782,587,500.00	14,673,797,740.00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	2,228,472,000.00	2,192,100,000.00	98.37	36,372,000.00	1,166,314,000.00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	140,000,000.00	139,838,000.00	99.88	162,000.00	182,481,000.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1,130,732,120.00	1,383,897,205.00	122.39	-253,165,085.00	754,113,620.00
5.2.05.03	Belanja Modal Hewan	0.00	0.00		0.00	194,935,000.00
5.2.05.04	Belanja Modal Biota Perairan	0.00	0.00		0.00	87,760,000.00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	332,100,000.00	330,397,500.00	99.49	1,702,500.00	398,728,000.00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	798,632,120.00	1,053,499,705.00	131.91	-254,867,585.00	72,690,620.00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2,000,000,000.00	1,227,604,402.64	61.38	772,395,597.36	2,981,313,814.00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2,000,000,000.00	1,227,604,402.64	61.38	772,395,597.36	2,981,313,814.00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	2,000,000,000.00	1,227,604,402.64	61.38	772,395,597.36	2,981,313,814.00
5.4	BELANJA TRANSFER	155,256,784,843.00	149,960,620,801.00	96.59	5,296,164,042.00	169,036,892,873.00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5,200,303,443.00	0.00	0.00	5,200,303,443.00	2,062,379,173.00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	5,200,303,443.00	0.00	0.00	5,200,303,443.00	587,400,002.00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	0.00	0.00		0.00	1,474,979,171.00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	150,056,481,400.00	149,960,620,801.00	99.94	95,860,599.00	166,974,513,700.00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	150,056,481,400.00	149,960,620,801.00	99.94	95,860,599.00	166,974,513,700.00
	JUMLAH BELANJA	1,415,033,219,500.00	1,262,300,840,319.64	89.21	152,732,379,180.36	1,114,651,028,778.10
	SURPLUS / DEFISIT	-349,476,152,064.00	-279,669,276,043.66			-91,827,554,729.02
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	354,626,854,579.00	349,527,067,579.66	98.56	5,099,786,999.34	122,332,409,308.68
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	23,401,854,579.00	23,401,854,579.66	100.00	-0.66	11,957,409,308.68
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	0.00	0.00		0.00	0.00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	0.00	0.00		0.00	0.00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	23,401,854,579.00	23,401,854,579.66	100.00	-0.66	1,402,567,064.68
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	0.00	0.00		0.00	10,554,842,244.00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	331,125,000,000.00	326,125,213,000.00	98.49	4,999,787,000.00	110,375,000,000.00
6.1.04.03	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0.00	0.00		0.00	110,375,000,000.00
6.1.04.04	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	331,125,000,000.00	326,125,213,000.00	98.49	4,999,787,000.00	0.00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00
6.1.05.06	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5,150,702,515.00	4,365,002,130.00	84.75	785,700,385.00	7,103,000,000.00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0.00	0.00		0.00	7,103,000,000.00
6.2.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	0.00	0.00		0.00	0.00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0.00	0.00		0.00	7,103,000,000.00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	5,150,702,515.00	4,365,002,130.00	84.75	785,700,385.00	0.00
6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	5,150,702,515.00	4,365,002,130.00	84.75	785,700,385.00	0.00
	PEMBIAYAAN NETTO	349,476,152,064.00	345,162,065,449.66			115,229,409,308.68
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0.00	65,492,789,406.00			23,401,854,579.66



LAMPIRAN I.1 : PERATURAN DAERAH
 NOMOR : 2 TAHUN 2023
 TANGGAL : 24 AGUSTUS 2023

PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TA 2022

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	69,061,099,805.00	61,707,927,991.80	7,353,171,813.20	89.35
	PENDAPATAN	1,065,557,067,436.00	982,631,564,275.98	82,925,503,160.02	92.22
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	40,000,000.00	15,150,000.00	24,850,000.00	37.88
	1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	40,000,000.00	15,150,000.00	24,850,000.00	37.88
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	68,362,199,805.00	61,084,083,296.80	7,278,116,508.20	89.35
	1.02.0.00.0.00.01.0000 UPT Rumah Sakit Umum Daerah Hajja Puang Sabbe	347,000,000.00	327,245,200.00	19,754,800.00	94.31
	1.02.1.02.1.02.01.0000 Dinas Kesehatan	16,449,374,734.00	15,520,313,970.00	929,060,764.00	94.35
	1.02.1.02.1.02.01.0001 Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Massenrempulu	51,565,825,071.00	45,236,524,126.80	6,329,300,944.20	87.73
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	658,900,000.00	608,694,695.00	50,205,305.00	92.38
	1.03.2.15.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	658,900,000.00	608,694,695.00	50,205,305.00	92.38
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1,475,498,000.00	1,072,010,500.00	403,487,500.00	72.65
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	270,000,000.00	195,311,500.00	74,688,500.00	72.34
	2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup	270,000,000.00	195,311,500.00	74,688,500.00	72.34
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	399,500,000.00	410,729,000.00	(11,229,000.00)	102.81
	2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan	399,500,000.00	410,729,000.00	(11,229,000.00)	102.81
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	155,998,000.00	157,845,000.00	(1,847,000.00)	101.18
	2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	155,998,000.00	157,845,000.00	(1,847,000.00)	101.18
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	650,000,000.00	308,125,000.00	341,875,000.00	47.40
	2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga & Pariwisata	650,000,000.00	308,125,000.00	341,875,000.00	47.40
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1,170,000,000.00	1,290,313,900.00	(120,313,900.00)	110.28
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	130,000,000.00	206,299,900.00	(76,299,900.00)	158.69

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG		
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%	
	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Peternakan dan Perikanan	130,000,000.00	206,299,900.00	(76,299,900.00)	158.69
3.27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	125,000,000.00	157,300,000.00	(32,300,000.00)	125.84
	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	125,000,000.00	157,300,000.00	(32,300,000.00)	125.84
3.31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	915,000,000.00	926,714,000.00	(11,714,000.00)	101.28
	3.31.3.30.0.00.31.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	915,000,000.00	926,714,000.00	(11,714,000.00)	101.28
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	37,300,000.00	9,050,000.00	28,250,000.00	24.26
4.01		SEKRETARIAT DAERAH	37,300,000.00	9,050,000.00	28,250,000.00	24.26
	4.01.0.00.0.00.01.00	Sekretariat Daerah	37,300,000.00	9,050,000.00	28,250,000.00	24.26
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	993,813,169,631.00	918,552,261,884.18	75,260,907,746.82	92.43
5.02		KEUANGAN	993,813,169,631.00	918,552,261,884.18	75,260,907,746.82	92.43
	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan dan Asset Daerah	978,995,636,078.00	902,261,147,948.00	76,734,488,130.00	92.16
	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	14,817,533,553.00	16,291,113,936.18	(1,473,580,383.18)	109.94
		BELANJA	1,415,033,219,500.00	1,262,300,840,319.64	152,732,379,180.36	89.21
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	956,098,226,223.00	833,590,214,569.00	122,508,011,654.00	87.19
1.01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	359,226,026,152.00	340,241,528,563.00	18,984,497,589.00	94.72
	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	359,226,026,152.00	340,241,528,563.00	18,984,497,589.00	94.72
		BELANJA OPERASI	299,026,937,743.00	281,074,121,772.00	17,952,815,971.00	94.00
		- Belanja Pegawai	260,106,463,789.00	241,678,932,528.00	18,427,531,261.00	92.92
		- Belanja Barang dan Jasa	30,068,528,698.00	31,451,837,244.00	(1,383,308,546.00)	104.60
		- Belanja Hibah	8,851,945,256.00	7,943,352,000.00	908,593,256.00	89.74
		BELANJA MODAL	60,199,088,409.00	59,167,406,791.00	1,031,681,618.00	98.29
1.02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	246,180,814,411.00	222,547,175,567.00	23,633,638,844.00	90.40
	1.02.0.00.0.00.01.0000	UPT Rumah Sakit Umum Daerah Hajja Puang Sabbe	3,615,970,000.00	3,076,492,705.00	539,477,295.00	85.08
		BELANJA OPERASI	3,345,142,146.00	2,817,430,535.00	527,711,611.00	84.22
		- Belanja Pegawai	1,557,696,374.00	1,448,345,354.00	109,351,020.00	92.98
		- Belanja Barang dan Jasa	1,787,445,772.00	1,369,085,181.00	418,360,591.00	76.59
		BELANJA MODAL	270,827,854.00	259,062,170.00	11,765,684.00	95.66
	1.02.1.02.1.02.01.0000	Dinas Kesehatan	160,231,155,518.00	142,673,343,612.00	17,557,811,906.00	89.04

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%
	BELANJA OPERASI	115,557,779,234.00	105,450,523,340.00	10,107,255,894.00	91.25
	- Belanja Pegawai	37,450,587,956.00	36,126,467,415.00	1,324,120,541.00	96.46
	- Belanja Barang dan Jasa	78,107,191,278.00	69,324,055,925.00	8,783,135,353.00	88.76
	BELANJA MODAL	44,673,376,284.00	37,222,820,272.00	7,450,556,012.00	83.32
1.02.1.02.1.02.01.0001	Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Massenrempulu	82,333,688,893.00	76,797,339,250.00	5,536,349,643.00	93.28
	BELANJA OPERASI	68,072,399,611.00	63,267,180,668.00	4,805,218,943.00	92.94
	- Belanja Pegawai	15,387,362,259.00	14,705,401,603.00	681,960,656.00	95.57
	- Belanja Barang dan Jasa	52,685,037,352.00	48,561,779,065.00	4,123,258,287.00	92.17
	BELANJA MODAL	14,261,289,282.00	13,530,158,582.00	731,130,700.00	94.87
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	329,151,884,743.00	251,470,265,813.00	77,681,618,930.00	76.40
1.03.2.15.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	329,151,884,743.00	251,470,265,813.00	77,681,618,930.00	76.40
	BELANJA OPERASI	31,233,971,593.00	27,884,272,063.00	3,349,699,530.00	89.28
	- Belanja Pegawai	3,689,282,578.00	3,678,041,035.00	11,241,543.00	99.70
	- Belanja Barang dan Jasa	14,482,934,015.00	11,996,384,228.00	2,486,549,787.00	82.83
	- Belanja Hibah	13,061,755,000.00	12,209,846,800.00	851,908,200.00	93.48
	BELANJA MODAL	297,917,913,150.00	223,585,993,750.00	74,331,919,400.00	75.05
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	11,599,545,534.00	9,812,100,937.00	1,787,444,597.00	84.59
1.04.2.10.0.00.02.0000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	11,599,545,534.00	9,812,100,937.00	1,787,444,597.00	84.59
	BELANJA OPERASI	7,950,462,534.00	7,530,104,137.00	420,358,397.00	94.71
	- Belanja Pegawai	2,057,828,990.00	1,856,655,265.00	201,173,725.00	90.22
	- Belanja Barang dan Jasa	5,492,633,544.00	5,273,448,872.00	219,184,672.00	96.01
	- Belanja Bantuan Sosial	400,000,000.00	400,000,000.00	-	100.00
	BELANJA MODAL	3,649,083,000.00	2,281,996,800.00	1,367,086,200.00	62.54
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	7,767,640,399.00	7,494,696,437.00	272,943,962.00	96.49
1.05.0.00.0.00.01.00	Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	4,603,729,864.00	4,474,459,871.00	129,269,993.00	97.19
	BELANJA OPERASI	4,603,729,864.00	4,474,459,871.00	129,269,993.00	97.19
	- Belanja Pegawai	2,738,829,866.00	2,638,752,808.00	100,077,058.00	96.35

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%
	- Belanja Barang dan Jasa	1,864,899,998.00	1,835,707,063.00	29,192,935.00	98.43
1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3,163,910,535.00	3,020,236,566.00	143,673,969.00	95.46
	BELANJA OPERASI	3,163,910,535.00	3,020,236,566.00	143,673,969.00	95.46
	- Belanja Pegawai	1,301,428,613.00	1,190,276,421.00	111,152,192.00	91.46
	- Belanja Barang dan Jasa	1,862,481,922.00	1,829,960,145.00	32,521,777.00	98.25
	BELANJA TIDAK TERDUGA	0.00	0.00	-	0.00
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	2,172,314,984.00	2,024,447,252.00	147,867,732.00	93.19
1.06.0.00.0.00.01.00	Dinas Sosial	2,172,314,984.00	2,024,447,252.00	147,867,732.00	93.19
	BELANJA OPERASI	2,172,314,984.00	2,024,447,252.00	147,867,732.00	93.19
	- Belanja Pegawai	1,638,189,270.00	1,498,942,763.00	139,246,507.00	91.50
	- Belanja Barang dan Jasa	534,125,714.00	525,504,489.00	8,621,225.00	98.39
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	95,081,036,035.00	88,558,950,613.00	6,522,085,422.00	93.14
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2,811,915,560.00	1,221,801,320.00	1,590,114,240.00	43.45
2.17.2.07.3.32.01.00	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2,811,915,560.00	1,221,801,320.00	1,590,114,240.00	43.45
	BELANJA OPERASI	2,811,915,560.00	1,221,801,320.00	1,590,114,240.00	43.45
	- Belanja Barang dan Jasa	2,811,915,560.00	1,221,801,320.00	1,590,114,240.00	43.45
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2,777,088,628.00	2,490,519,605.00	286,569,023.00	89.68
2.08.0.00.0.00.01.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2,777,088,628.00	2,490,519,605.00	286,569,023.00	89.68
	BELANJA OPERASI	2,777,088,628.00	2,490,519,605.00	286,569,023.00	89.68
	- Belanja Pegawai	1,728,220,008.00	1,637,153,770.00	91,066,238.00	94.73
	- Belanja Barang dan Jasa	1,048,868,620.00	853,365,835.00	195,502,785.00	81.36
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	1,977,980,986.00	1,877,534,024.00	100,446,962.00	94.92
2.09.0.00.0.00.01.00	Dinas Ketahanan Pangan	1,977,980,986.00	1,877,534,024.00	100,446,962.00	94.92
	BELANJA OPERASI	1,977,980,986.00	1,877,534,024.00	100,446,962.00	94.92
	- Belanja Pegawai	1,423,976,851.00	1,345,469,281.00	78,507,570.00	94.49
	- Belanja Barang dan Jasa	554,004,135.00	532,064,743.00	21,939,392.00	96.04
	- Belanja Hibah	0.00	0.00	-	0.00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	1,466,897,731.00	232,790,771.00	1,234,106,960.00	15.87
1.04.2.10.0.00.02.0000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1,466,897,731.00	232,790,771.00	1,234,106,960.00	15.87
	BELANJA OPERASI	441,897,731.00	232,790,771.00	209,106,960.00	52.68
	- Belanja Barang dan Jasa	441,897,731.00	232,790,771.00	209,106,960.00	52.68
	- Belanja Hibah	0.00	0.00	-	0.00
	BELANJA MODAL	1,025,000,000.00	0.00	1,025,000,000.00	0.00
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	7,619,976,795.00	7,312,321,651.00	307,655,144.00	95.96
2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	7,619,976,795.00	7,312,321,651.00	307,655,144.00	95.96
	BELANJA OPERASI	7,619,976,795.00	7,312,321,651.00	307,655,144.00	95.96
	- Belanja Pegawai	3,200,470,714.00	2,893,417,851.00	307,052,863.00	90.41
	- Belanja Barang dan Jasa	4,419,506,081.00	4,418,903,800.00	602,281.00	99.99
	BELANJA MODAL	0.00	0.00	-	0.00
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3,094,843,016.00	3,022,570,527.00	72,272,489.00	97.66
2.12.0.00.0.00.01.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3,094,843,016.00	3,022,570,527.00	72,272,489.00	97.66
	BELANJA OPERASI	2,899,843,016.00	2,827,580,527.00	72,262,489.00	97.51
	- Belanja Pegawai	1,740,922,626.00	1,676,440,475.00	64,482,151.00	96.30
	- Belanja Barang dan Jasa	1,158,920,390.00	1,151,140,052.00	7,780,338.00	99.33
	BELANJA MODAL	195,000,000.00	194,990,000.00	10,000.00	99.99
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5,301,276,056.00	4,927,539,920.00	373,736,136.00	92.95
2.13.0.00.0.00.01.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5,301,276,056.00	4,927,539,920.00	373,736,136.00	92.95
	BELANJA OPERASI	5,205,648,656.00	4,832,164,920.00	373,483,736.00	92.83
	- Belanja Pegawai	1,844,321,456.00	1,753,340,810.00	90,980,646.00	95.07
	- Belanja Barang dan Jasa	3,263,372,200.00	2,980,870,110.00	282,502,090.00	91.34
	- Belanja Hibah	97,955,000.00	97,954,000.00	1,000.00	100.00
	BELANJA MODAL	95,627,400.00	95,375,000.00	252,400.00	99.74
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	8,871,096,126.00	8,371,977,889.00	499,118,237.00	94.37
2.14.0.00.0.00.01.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	8,871,096,126.00	8,371,977,889.00	499,118,237.00	94.37

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%
	BELANJA OPERASI	7,105,920,126.00	6,635,034,889.00	470,885,237.00	93.37
	- Belanja Pegawai	2,214,333,034.00	2,091,474,059.00	122,858,975.00	94.45
	- Belanja Barang dan Jasa	4,891,587,092.00	4,543,560,830.00	348,026,262.00	92.89
	BELANJA MODAL	1,765,176,000.00	1,736,943,000.00	28,233,000.00	98.40
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	4,012,783,363.00	3,911,473,654.00	101,309,709.00	97.48
	1.03.2.15.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	750,000,000.00	748,562,151.00	1,437,849.00	99.81
	BELANJA OPERASI	610,000,000.00	608,724,151.00	1,275,849.00	99.79
	- Belanja Barang dan Jasa	610,000,000.00	608,724,151.00	1,275,849.00	99.79
	BELANJA MODAL	140,000,000.00	139,838,000.00	162,000.00	99.88
	2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan	3,262,783,363.00	3,162,911,503.00	99,871,860.00	96.94
	BELANJA OPERASI	3,262,783,363.00	3,162,911,503.00	99,871,860.00	96.94
	- Belanja Pegawai	2,545,031,461.00	2,449,276,834.00	95,754,627.00	96.24
	- Belanja Barang dan Jasa	717,751,902.00	713,634,669.00	4,117,233.00	99.43
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3,920,456,821.00	3,842,966,387.00	77,490,434.00	98.02
	2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	3,920,456,821.00	3,842,966,387.00	77,490,434.00	98.02
	BELANJA OPERASI	3,920,456,821.00	3,842,966,387.00	77,490,434.00	98.02
	- Belanja Pegawai	1,641,037,747.00	1,574,354,364.00	66,683,383.00	95.94
	- Belanja Barang dan Jasa	2,279,419,074.00	2,268,612,023.00	10,807,051.00	99.53
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	3,300,903,788.00	3,209,617,591.00	91,286,197.00	97.23
	2.17.2.07.3.32.01.00 Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3,300,903,788.00	3,209,617,591.00	91,286,197.00	97.23
	BELANJA OPERASI	3,300,903,788.00	3,209,617,591.00	91,286,197.00	97.23
	- Belanja Pegawai	1,669,175,061.00	1,590,800,045.00	78,375,016.00	95.30
	- Belanja Barang dan Jasa	831,728,727.00	824,245,546.00	7,483,181.00	99.10
	- Belanja Hibah	800,000,000.00	794,572,000.00	5,428,000.00	99.32
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2,677,021,259.00	2,537,675,102.00	139,346,157.00	94.79
	2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2,677,021,259.00	2,537,675,102.00	139,346,157.00	94.79
	BELANJA OPERASI	2,677,021,259.00	2,537,675,102.00	139,346,157.00	94.79
	- Belanja Pegawai	1,696,696,296.00	1,584,322,721.00	112,373,575.00	93.38

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%
	- Belanja Barang dan Jasa	980,324,963.00	953,352,381.00	26,972,582.00	97.25
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	39,078,866,641.00	37,788,528,831.00	1,290,337,810.00	96.70
	2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga & Pariwisata	39,078,866,641.00	37,788,528,831.00	1,290,337,810.00	96.70
	BELANJA OPERASI	9,372,896,591.00	8,082,558,781.00	1,290,337,810.00	86.23
	- Belanja Pegawai	1,683,375,437.00	1,626,276,785.00	57,098,652.00	96.61
	- Belanja Barang dan Jasa	6,189,521,154.00	5,006,281,996.00	1,183,239,158.00	80.88
	- Belanja Hibah	1,500,000,000.00	1,450,000,000.00	50,000,000.00	96.67
	BELANJA MODAL	29,705,970,050.00	29,705,970,050.00	-	100.00
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	7,527,133.00	7,527,000.00	133.00	100.00
	2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	7,527,133.00	7,527,000.00	133.00	100.00
	BELANJA OPERASI	7,527,133.00	7,527,000.00	133.00	100.00
	- Belanja Barang dan Jasa	7,527,133.00	7,527,000.00	133.00	100.00
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	7,509,000.00	7,509,000.00	-	100.00
	2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	7,509,000.00	7,509,000.00	-	100.00
	BELANJA OPERASI	7,509,000.00	7,509,000.00	-	100.00
	- Belanja Barang dan Jasa	7,509,000.00	7,509,000.00	-	100.00
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	634,347,050.00	473,379,304.00	160,967,746.00	74.62
	1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	634,347,050.00	473,379,304.00	160,967,746.00	74.62
	BELANJA OPERASI	634,347,050.00	473,379,304.00	160,967,746.00	74.62
	- Belanja Barang dan Jasa	634,347,050.00	473,379,304.00	160,967,746.00	74.62
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	7,425,498,382.00	7,228,239,509.00	197,258,873.00	97.34
	2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7,425,498,382.00	7,228,239,509.00	197,258,873.00	97.34
	BELANJA OPERASI	3,740,356,382.00	3,674,302,832.00	66,053,550.00	98.23
	- Belanja Pegawai	2,769,166,212.00	2,729,048,687.00	40,117,525.00	98.55
	- Belanja Barang dan Jasa	971,190,170.00	945,254,145.00	25,936,025.00	97.33
	BELANJA MODAL	3,685,142,000.00	3,553,936,677.00	131,205,323.00	96.44
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	95,047,700.00	94,978,528.00	69,172.00	99.93
	2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	95,047,700.00	94,978,528.00	69,172.00	99.93

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%
	BELANJA OPERASI	95,047,700.00	94,978,528.00	69,172.00	99.93
	- Belanja Barang dan Jasa	95,047,700.00	94,978,528.00	69,172.00	99.93
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	72,326,894,950.00	67,309,250,292.00	5,017,644,658.00	93.06
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	4,120,171,819.00	3,956,425,463.00	163,746,356.00	96.03
	3.25.3.27.0.00.01.0000 Dinas Peternakan dan Perikanan	4,120,171,819.00	3,956,425,463.00	163,746,356.00	96.03
	BELANJA OPERASI	4,120,171,819.00	3,956,425,463.00	163,746,356.00	96.03
	- Belanja Pegawai	3,029,160,958.00	2,866,515,357.00	162,645,601.00	94.63
	- Belanja Barang dan Jasa	1,089,476,561.00	1,088,375,806.00	1,100,755.00	99.90
	- Belanja Hibah	1,534,300.00	1,534,300.00	-	100.00
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	8,912,083,300.00	6,472,607,288.00	2,439,476,012.00	72.63
	2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga & Pariwisata	8,912,083,300.00	6,472,607,288.00	2,439,476,012.00	72.63
	BELANJA OPERASI	6,739,532,000.00	4,380,533,988.00	2,358,998,012.00	65.00
	- Belanja Barang dan Jasa	6,739,532,000.00	4,380,533,988.00	2,358,998,012.00	65.00
	BELANJA MODAL	2,172,551,300.00	2,092,073,300.00	80,478,000.00	96.30
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	22,965,774,876.00	20,971,417,603.00	1,994,357,273.00	91.32
	3.25.3.27.0.00.01.0000 Dinas Peternakan dan Perikanan	377,521,200.00	369,756,700.00	7,764,500.00	97.94
	BELANJA OPERASI	377,521,200.00	369,756,700.00	7,764,500.00	97.94
	- Belanja Barang dan Jasa	377,521,200.00	369,756,700.00	7,764,500.00	97.94
	- Belanja Hibah	0.00	0.00	-	0.00
	3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	22,588,253,676.00	20,601,660,903.00	1,986,592,773.00	91.21
	BELANJA OPERASI	22,518,435,672.00	20,531,842,899.00	1,986,592,773.00	91.18
	- Belanja Pegawai	10,090,944,291.00	10,067,144,291.00	23,800,000.00	99.76
	- Belanja Barang dan Jasa	4,717,387,314.00	4,578,906,841.00	138,480,473.00	97.06
	- Belanja Hibah	7,710,104,067.00	5,885,791,767.00	1,824,312,300.00	76.34
	BELANJA MODAL	69,818,004.00	69,818,004.00	-	100.00
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	35,494,670,655.00	35,078,596,938.00	416,073,717.00	98.83
	3.31.3.30.0.00.31.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	35,494,670,655.00	35,078,596,938.00	416,073,717.00	98.83
	BELANJA OPERASI	2,903,159,955.00	2,701,010,238.00	202,149,717.00	93.04

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%
	- Belanja Pegawai	1,874,064,975.00	1,697,090,078.00	176,974,897.00	90.56
	- Belanja Barang dan Jasa	1,029,094,980.00	1,003,920,160.00	25,174,820.00	97.55
	BELANJA MODAL	32,591,510,700.00	32,377,586,700.00	213,924,000.00	99.34
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	824,194,300.00	820,203,000.00	3,991,300.00	99.52
	3.31.3.30.0.00.31.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	824,194,300.00	820,203,000.00	3,991,300.00	99.52
	BELANJA OPERASI	824,194,300.00	820,203,000.00	3,991,300.00	99.52
	- Belanja Barang dan Jasa	146,531,800.00	146,229,000.00	302,800.00	99.79
	- Belanja Hibah	677,662,500.00	673,974,000.00	3,688,500.00	99.46
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100.00
	2.17.2.07.3.32.01.00 Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100.00
	BELANJA OPERASI	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100.00
	- Belanja Barang dan Jasa	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100.00
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	67,398,376,382.00	65,092,107,938.00	2,306,268,444.00	96.58
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	40,210,332,442.00	39,533,660,616.00	676,671,826.00	98.32
	4.01.0.00.0.00.01.00 Sekretariat Daerah	40,210,332,442.00	39,533,660,616.00	676,671,826.00	98.32
	BELANJA OPERASI	38,148,278,020.00	37,563,268,616.00	585,009,404.00	98.47
	- Belanja Pegawai	8,735,750,245.00	8,635,212,717.00	100,537,528.00	98.85
	- Belanja Barang dan Jasa	27,094,527,775.00	26,630,155,899.00	464,371,876.00	98.29
	- Belanja Hibah	2,318,000,000.00	2,297,900,000.00	20,100,000.00	99.13
	BELANJA MODAL	2,062,054,422.00	1,970,392,000.00	91,662,422.00	95.55
4.02	SEKRETARIAT DPRD	27,188,043,940.00	25,558,447,322.00	1,629,596,618.00	94.01
	4.02.0.00.0.00.01.00 Sekretariat DPRD	27,188,043,940.00	25,558,447,322.00	1,629,596,618.00	94.01
	BELANJA OPERASI	27,138,043,940.00	25,558,447,322.00	1,579,596,618.00	94.18
	- Belanja Pegawai	12,013,019,128.00	11,690,515,386.00	322,503,742.00	97.32
	- Belanja Barang dan Jasa	15,125,024,812.00	13,867,931,936.00	1,257,092,876.00	91.69
	BELANJA MODAL	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	187,322,549,084.00	174,279,709,207.64	13,042,839,876.36	93.04
5.01	PERENCANAAN	3,708,611,854.00	3,595,600,620.00	113,011,234.00	96.95

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3,708,611,854.00	3,595,600,620.00	113,011,234.00	96.95
	BELANJA OPERASI	3,608,611,854.00	3,497,088,120.00	111,523,734.00	96.91
	- Belanja Pegawai	1,873,283,049.00	1,791,097,101.00	82,185,948.00	95.61
	- Belanja Barang dan Jasa	1,735,328,805.00	1,705,991,019.00	29,337,786.00	98.31
	BELANJA MODAL	100,000,000.00	98,512,500.00	1,487,500.00	98.51
5.02	KEUANGAN	178,466,974,820.00	165,642,130,950.64	12,824,843,869.36	92.81
5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan dan Asset Daerah	172,247,174,623.00	160,275,695,496.64	11,971,479,126.36	93.05
	BELANJA OPERASI	14,465,900,550.00	8,726,350,293.00	5,739,550,257.00	60.32
	- Belanja Pegawai	7,586,272,424.00	2,355,065,236.00	5,231,207,188.00	31.04
	- Belanja Barang dan Jasa	6,879,628,126.00	6,371,285,057.00	508,343,069.00	92.61
	BELANJA MODAL	524,489,230.00	361,120,000.00	163,369,230.00	68.85
	BELANJA TIDAK TERDUGA	2,000,000,000.00	1,227,604,402.64	772,395,597.36	61.38
	BELANJA TRANSFER	155,256,784,843.00	149,960,620,801.00	5,296,164,042.00	96.59
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	6,219,800,197.00	5,366,435,454.00	853,364,743.00	86.28
	BELANJA OPERASI	6,219,800,197.00	5,366,435,454.00	853,364,743.00	86.28
	- Belanja Pegawai	4,124,807,700.00	3,446,068,178.00	678,739,522.00	83.54
	- Belanja Barang dan Jasa	2,094,992,497.00	1,920,367,276.00	174,625,221.00	91.66
5.03	KEPEGAWAIAN	3,998,367,910.00	3,896,757,937.00	101,609,973.00	97.46
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3,998,367,910.00	3,896,757,937.00	101,609,973.00	97.46
	BELANJA OPERASI	3,998,367,910.00	3,896,757,937.00	101,609,973.00	97.46
	- Belanja Pegawai	2,193,790,520.00	2,180,696,747.00	13,093,773.00	99.40
	- Belanja Barang dan Jasa	1,804,577,390.00	1,716,061,190.00	88,516,200.00	95.09
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1,048,594,500.00	1,046,130,000.00	2,464,500.00	99.76
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1,048,594,500.00	1,046,130,000.00	2,464,500.00	99.76
	BELANJA OPERASI	1,048,594,500.00	1,046,130,000.00	2,464,500.00	99.76
	- Belanja Barang dan Jasa	1,048,594,500.00	1,046,130,000.00	2,464,500.00	99.76
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	100,000,000.00	99,089,700.00	910,300.00	99.09
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	100,000,000.00	99,089,700.00	910,300.00	99.09

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%
	BELANJA OPERASI	100,000,000.00	99,089,700.00	910,300.00	99.09
	- Belanja Barang dan Jasa	100,000,000.00	99,089,700.00	910,300.00	99.09
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	10,226,330,000.00	9,442,160,974.00	784,169,026.00	92.33
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	10,226,330,000.00	9,442,160,974.00	784,169,026.00	92.33
	6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat	10,226,330,000.00	9,442,160,974.00	784,169,026.00	92.33
	BELANJA OPERASI	10,046,570,500.00	9,267,005,114.00	779,565,386.00	92.24
	- Belanja Pegawai	5,801,852,905.00	5,389,931,024.00	411,921,881.00	92.90
	- Belanja Barang dan Jasa	4,244,717,595.00	3,877,074,090.00	367,643,505.00	91.34
	BELANJA MODAL	179,759,500.00	175,155,860.00	4,603,640.00	97.44
7	UNSUR KEWILAYAHAN	23,956,801,963.00	21,599,868,793.00	2,356,933,170.00	90.16
7.01	KECAMATAN	23,956,801,963.00	21,599,868,793.00	2,356,933,170.00	90.16
	7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Maiwa	2,210,455,796.00	2,089,828,787.00	120,627,009.00	94.54
	BELANJA OPERASI	2,210,455,796.00	2,089,828,787.00	120,627,009.00	94.54
	- Belanja Pegawai	1,853,289,369.00	1,732,917,980.00	120,371,389.00	93.50
	- Belanja Barang dan Jasa	357,166,427.00	356,910,807.00	255,620.00	99.93
	7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Cendana	981,514,451.00	876,180,852.00	105,333,599.00	89.27
	BELANJA OPERASI	981,514,451.00	876,180,852.00	105,333,599.00	89.27
	- Belanja Pegawai	836,141,388.00	733,562,868.00	102,578,520.00	87.73
	- Belanja Barang dan Jasa	145,373,063.00	142,617,984.00	2,755,079.00	98.10
	7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Enrekang	3,927,636,564.00	3,553,102,404.00	374,534,160.00	90.46
	BELANJA OPERASI	3,927,636,564.00	3,553,102,404.00	374,534,160.00	90.46
	- Belanja Pegawai	3,125,652,916.00	2,757,735,850.00	367,917,066.00	88.23
	- Belanja Barang dan Jasa	801,983,648.00	795,366,554.00	6,617,094.00	99.17
	7.01.0.00.0.00.04.00 Kecamatan Anggeraja	2,714,391,198.00	2,386,555,645.00	327,835,553.00	87.92
	BELANJA OPERASI	2,714,391,198.00	2,386,555,645.00	327,835,553.00	87.92
	- Belanja Pegawai	2,230,722,669.00	1,911,239,319.00	319,483,350.00	85.68
	- Belanja Barang dan Jasa	483,668,529.00	475,316,326.00	8,352,203.00	98.27
	7.01.0.00.0.00.05.00 Kecamatan Baraka	2,791,581,752.00	2,229,019,456.00	562,562,296.00	79.85

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%
	BELANJA OPERASI	2,791,581,752.00	2,229,019,456.00	562,562,296.00	79.85
	- Belanja Pegawai	2,282,527,252.00	1,721,613,368.00	560,913,884.00	75.43
	- Belanja Barang dan Jasa	509,054,500.00	507,406,088.00	1,648,412.00	99.68
7.01.0.00.0.00.06.00	Kecamatan Malua	1,898,961,881.00	1,808,344,254.00	90,617,627.00	95.23
	BELANJA OPERASI	1,898,961,881.00	1,808,344,254.00	90,617,627.00	95.23
	- Belanja Pegawai	1,649,122,889.00	1,562,065,204.00	87,057,685.00	94.72
	- Belanja Barang dan Jasa	249,838,992.00	246,279,050.00	3,559,942.00	98.58
7.01.0.00.0.00.07.00	Kecamatan Buntu Batu	1,228,284,224.00	1,201,640,674.00	26,643,550.00	97.83
	BELANJA OPERASI	1,228,284,224.00	1,201,640,674.00	26,643,550.00	97.83
	- Belanja Pegawai	1,025,009,496.00	1,003,752,766.00	21,256,730.00	97.93
	- Belanja Barang dan Jasa	203,274,728.00	197,887,908.00	5,386,820.00	97.35
7.01.0.00.0.00.08.00	Kecamatan Alla	3,173,457,200.00	3,152,066,609.00	21,390,591.00	99.33
	BELANJA OPERASI	3,173,457,200.00	3,152,066,609.00	21,390,591.00	99.33
	- Belanja Pegawai	2,645,263,348.00	2,625,903,415.00	19,359,933.00	99.27
	- Belanja Barang dan Jasa	528,193,852.00	526,163,194.00	2,030,658.00	99.62
7.01.0.00.0.00.09.00	Kecamatan Curio	1,350,062,948.00	1,175,080,406.00	174,982,542.00	87.04
	BELANJA OPERASI	1,350,062,948.00	1,175,080,406.00	174,982,542.00	87.04
	- Belanja Pegawai	1,156,577,898.00	983,432,306.00	173,145,592.00	85.03
	- Belanja Barang dan Jasa	193,485,050.00	191,648,100.00	1,836,950.00	99.05
7.01.0.00.0.00.10.00	Kecamatan Baroko	1,253,495,000.00	975,775,261.00	277,719,739.00	77.84
	BELANJA OPERASI	1,253,495,000.00	975,775,261.00	277,719,739.00	77.84
	- Belanja Pegawai	1,076,516,334.00	803,975,261.00	272,541,073.00	74.68
	- Belanja Barang dan Jasa	176,978,666.00	171,800,000.00	5,178,666.00	97.07
7.01.0.00.0.00.11.00	Kecamatan Masalle	940,419,729.00	820,321,369.00	120,098,360.00	87.23
	BELANJA OPERASI	940,419,729.00	820,321,369.00	120,098,360.00	87.23
	- Belanja Pegawai	755,102,299.00	640,321,369.00	114,780,930.00	84.80
	- Belanja Barang dan Jasa	185,317,430.00	180,000,000.00	5,317,430.00	97.13
7.01.0.00.0.00.12.0000	KECAMATAN BUNGIN	1,486,541,220.00	1,331,953,076.00	154,588,144.00	89.60

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%
	BELANJA OPERASI	1,486,541,220.00	1,331,953,076.00	154,588,144.00	89.60
	- Belanja Pegawai	1,296,294,692.00	1,141,839,076.00	154,455,616.00	88.08
	- Belanja Barang dan Jasa	190,246,528.00	190,114,000.00	132,528.00	99.93
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	2,623,004,863.00	2,428,577,933.00	194,426,930.00	92.59
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2,623,004,863.00	2,428,577,933.00	194,426,930.00	92.59
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2,623,004,863.00	2,428,577,933.00	194,426,930.00	92.59
	BELANJA OPERASI	2,623,004,863.00	2,428,577,933.00	194,426,930.00	92.59
	- Belanja Pegawai	1,127,543,736.00	1,072,633,675.00	54,910,061.00	95.13
	- Belanja Barang dan Jasa	572,804,942.00	433,288,073.00	139,516,869.00	75.64
	- Belanja Hibah	922,656,185.00	922,656,185.00	-	100.00
	SURPLUS/(DEFISIT)	-349,476,152,064.00	-279,669,276,043.66		



LAMPIRAN 1.2 : PERATURAN DAERAH

NOMOR : 2 TAHUN 2023

TANGGAL : 24 AGUSTUS 2023

**PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
RINGKASAN REALISASI ANGGARAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK
DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
4	PENDAPATAN DAERAH	1,065,557,067,436.00	982,607,686,346.18	92.22	1,022,823,474,049.08
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	176,262,839,970.00	102,285,515,061.18	58.03	73,308,654,593.08
4.1.01	Pajak Daerah	14,752,533,553.00	16,231,913,936.18	110.03	13,400,072,275.19
4.1.02	Retribusi Daerah	58,897,523,071.00	51,972,683,462.00	88.24	27,018,859,184.00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18,741,119,760.00	13,466,084,356.00	71.85	15,896,115,974.00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	83,871,663,586.00	20,614,833,307.00	24.58	16,993,607,159.89
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	887,294,227,466.00	880,321,968,985.00	99.21	916,110,206,456.00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	838,225,651,000.00	823,676,440,803.00	98.26	877,880,671,777.00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	49,068,576,466.00	56,645,528,182.00	115.44	38,229,534,679.00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2,000,000,000.00	202,300.00	0.01	33,404,613,000.00
4.3.01	Pendapatan Hibah	2,000,000,000.00	202,300.00	0.01	3,213,000,000.00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0.00	0.00	100.00	30,191,613,000.00
	JUMLAH PENDAPATAN	1,065,557,067,436.00	982,607,686,346.18	92.22	1,022,823,474,049.08
5	BELANJA DAERAH	1,415,033,219,500.00	1,262,300,840,319.64	89.21	1,114,651,028,778.10
5.1	BELANJA OPERASI	762,442,758,072.00	702,493,465,660.00	92.14	690,392,852,608.10
5.1.01	Belanja Pegawai	428,467,107,079.00	396,583,519,446.00	92.56	403,037,853,822.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	297,634,038,685.00	273,232,365,162.00	91.80	261,796,418,544.10
5.1.03	Belanja Bunga	0.00	0.00	100.00	1,020,968,750.00
5.1.05	Belanja Hibah	35,941,612,308.00	32,277,581,052.00	89.81	23,342,811,492.00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	400,000,000.00	400,000,000.00	100.00	1,194,800,000.00
5.2	BELANJA MODAL	495,333,676,585.00	408,619,149,456.00	82.49	252,239,969,483.00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1,025,000,000.00	0.00	0.00	1,159,712,000.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57,468,041,083.00	56,682,720,476.00	98.63	31,835,297,573.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	135,996,924,932.00	126,187,497,325.00	92.79	83,740,876,388.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	299,712,978,450.00	224,365,034,450.00	74.86	134,749,969,902.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1,130,732,120.00	1,383,897,205.00	122.39	754,113,620.00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2,000,000,000.00	1,227,604,402.64	61.38	2,981,313,814.00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2,000,000,000.00	1,227,604,402.64	61.38	2,981,313,814.00
5.4	BELANJA TRANSFER	155,256,784,843.00	149,960,620,801.00	96.59	169,036,892,873.00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5,200,303,443.00	0.00	0.00	2,062,379,173.00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	150,056,481,400.00	149,960,620,801.00	99.94	166,974,513,700.00
	JUMLAH BELANJA	1,415,033,219,500.00	1,262,300,840,319.64	89.21	1,114,651,028,778.10
	SURPLUS / DEFISIT	(349,476,152,064.00)	(279,693,153,973.46)		(91,827,554,729.02)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	359,777,557,094.00	353,892,069,709.66	98.36	129,435,409,308.68
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	354,626,854,579.00	349,527,067,579.66	98.56	122,332,409,308.68
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	23,401,854,579.00	23,401,854,579.66	100.00	11,957,409,308.68
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	331,125,000,000.00	326,125,213,000.00	98.49	110,375,000,000.00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5,150,702,515.00	4,365,002,130.00	84.75	7,103,000,000.00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0.00	0.00	100.00	7,103,000,000.00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	5,150,702,515.00	4,365,002,130.00	84.75	0.00
	PEMBIAYAAN NETTO	349,476,152,064.00	345,162,065,449.66		115,229,409,308.68
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0.00	65,468,911,476.20		23,401,854,579.66

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
------------------	--------	------------------	-------------------	---	-------------------

